



Pengaruh Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Ahmad Dani¹, Sandi²

^{1,2} Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia

Alamat : Jl. Teladan No.15, Teladan Bar., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara 20214

Email: ahmaddani@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan tentang Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Kebijakan Pengawasan adalah ketetapan yang dibuat untuk usaha guna mengetahui kondisi dari kegiatan yang sedang dilakukan apakah telah mencapai sasaran yang ditentukan. Kebijakan Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar dan perencanaan yang dirancang sebagai sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan, mengetahui apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut. Serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan bahwa semua sumber daya dan organisasi telah digunakan dengan efektif dalam mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Teknik pengambilan data sekunder dan data primer menggunakan teknik wawancara, dan angket, dimana populasi penelitian adalah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, berjumlah 30 orang. Metode Analisa digunakan Analisa Korelasi Product Moment. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa semakin baik Kebijakan Pengawasan yang dimiliki Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam dimensi Sistem dan cara kerja, Perbaikan kesalahan kerja, Prosedur atau kebijaksanaan, Kompensasi dan Penggunaan alat dan fasilitas kerja akan diikuti oleh semakin Efisiensi, Efektif, Keadilan, Responsibilitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Faktor kebijakan pelaksanaan Sistem dan cara kerja, Perbaikan kesalahan kerja, Prosedur atau kebijaksanaan, Kompensasi dan Penggunaan alat dan fasilitas kerja akan diikuti oleh semakin Efisiensi, Efektif, Keadilan, Responsibilitas dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Kebijakan Pengawasan, Pelayanan Publik

PENDAHULUAN

Implementasi publik yang akurat dan transparansi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat perlu dukungan Kebijakan Pengawasan yang baik dan tepat dalam mewujudkan pelayanan publik sebagai sentral pelayanan kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Kebijakan Pengawasan adalah usaha untuk mengetahui kondisi dari kegiatan yang sedang dilakukan apakah telah mencapai sasaran yang ditentukan. Kebijakan Pengawasan dipandang mempunyai pengaruh terhadap pelayanan publik atau sejauh mana Kebijakan Pengawasan memberikan peluang terhadap pelayanan publik secara baik dan tepat terhadap pelayanan kantor.

Penelitian dilakukan pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pemerintah yang melayani kepentingan publik, khususnya di bidang Perhubungan dan Transportasi di Provinsi Sumatera Utara. Pelayanan Publik yang terdapat pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara penting diketahui dan memberikan pemahaman dalam pengembangan kenyamanan dan aksesibilitas masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Melalui pengamatan awal yang dilakukan peneliti bahwa rendahnya Kebijakan Pengawasan mengakibatkan dampaknya pada belum terlaksana pelayanan publik dengan baik. Hal ini terindikasi bahwa Tata Kerja yaitu cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas sesuatu dengan mempertimbangkan segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga kerja, waktu, ruang dan biaya yang tersedia. Tata Kerja, Perosedur Kerja dan Sistem Kerja penting artinya sebagai suatu pola kerja yang merupakan penjabaran tujuan, sasaran, program kerja, fungsi-fungsi dan kebijaksanaan ke dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang nyata dan melembaga. Berdasarkan uraian-uraian di muka, peneliti tertarik melakukan penelitian mengangkat dengan judul Kebijakan Pengawasan terhadap Pelayanan Publik pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian kuantitatif ini peneliti adalah instrumen. Validitas dan metode-metode kualitatif banyak bergantung pada keterampilan, kemampuan, dan kecermatan yang melakukan kerja lapangan (Suyanto, 2011:168-169). Penelitian ini dilakukan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Menurut Sugiyono (2017:80), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasi adalah Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi

Sumatera Utara, berjumlah 30 orang. Metode Analisa digunakan Analisa Korelasi Product Moment.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Jumlah pegawai pria 20 orang atau 66.66% dari seluruh Pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan pegawai wanita sebanyak 10 orang atau 32,34%. Data ini mencerminkan pegawai pria pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara lebih banyak dari pada pegawai wanita.

Pegawai dengan usia antara 40 tahun atau sama dengan 40 tahun sampai dengan usia 49 tahun berjumlah 19 orang atau 66,33% dari seluruh jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara, Data ini sekaligus mencerminkan pegawai dengan usia antara 40 tahun atau sama dengan 40 tahun sampai dengan usia 49 tahun lebih banyak dari pada usia lainnya. Pegawai dengan Pendidikan S-1 berjumlah 18 orang atau 60.00% dari seluruh sampel pegawai. Data ini sekaligus mencerminkan pegawai berpendidikan S-1 lebih banyak daripada lainnya.

Variabel Bebas (X) Kebijakan Pengawasan

Dari perhitungan di atas dapat diketahui rata-rata jawaban responden terhadap variabel bebas (X) kebijakan pengawasan adalah 29.16 tergolong pada kategori tinggi berada pada Angka 23.34 s/d 30 tergolong kategori tinggi.

Berdasarkan rumus, maka panjang interval adalah 0.66.

Melalui pengelolaan arsip yang dilakukan kantor dapat mempermudah dapat diketahui jumlah skor jawaban 10 item angket adalah 1076 dari 30 orang responden Variabel Bebas (X) Kebijakan Pengawasan dengan rata-rata jawaban responden adalah 2,90, tergolong kategori tinggi artinya Kebijakan Pengawasan diterapkan adalah baik dan tepat dalam mendukung pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

Dari perhitungan di atas dapat diketahui rata-rata jawaban responden terhadap variabel Terikat (Y) Pelayanan Publik adalah 29.78 tergolong pada kategori tinggi Angka 23.34 s/d 30 tergolong kategori tinggi.

Berdasarkan rata-rata jawaban responden sebesar 28.96 tergolong kategori Tinggi, Artinya pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara tercapai dengan baik. Diketahui rata-rata jawaban dari 30 orang responden untuk Variabel Terikat (Y) pelayanan publik adalah 2,90 angka ini tergolong kategori tinggi artinya pelayanan publik tercapai dengan baik.

Pelayanan publik dapat dilaksanakan secara berkelanjutan, dari 30 orang responden, 29 orang menjawab Ya, dengan jumlah skor 92, dimana rata-rata jawaban responden 2,96 angka ini tergolong tinggi. Artinya pelayanan publik dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

1. Analisa Korelasi dan Uji Hipotesa

Untuk mengetahui hubungan kebijakan pengawasan terhadap pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Besar hubungan kebijakan pengawasan terhadap pelayanan publik adalah 0,97 Angka koefisien korelasi $R_{xy} = 0,97$ apabila dikompersikan pada tabel kritik r product moment ($n = 30$) dengan $df = 95\%$ terdapat angka r tabel = 0.349 dimana $r_{xy} = 0,97 > 0,349$ ini menyatakan kebijakan pengawasan memiliki hubungan yang positif terhadap pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

2. Uji Signifikansi koefisien Korelasi

Guna mengetahui signifikansi hubungan kebijakan pengawasan terhadap pelayanan publik digunakan Uji t dengan rumus sebagaimana dikemukakan Sudjana dalam Arikunto, (2013:83). Berdasarkan hasil Uji t diperoleh nilai t hitung= 21,816 dikompersikan pada angka kritik t tabel dengan (df) 0,5 % pada ($n-1$) terdapat angka sebesar 1,697 dimana $21,816 > 1,697$ artinya hasilnya signifikan dan hipotesa Kebijakan Pengawasan memiliki hubungan yang positif Kuat terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

KESIMPULAN

Pelayanan publik adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam lembaga pemerintah dengan dilandasi oleh ketulusan dan keikhlasan tanpa

didasari faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan orang lain sesuai dengan haknya, Kebijakan pengawasan memiliki hubungan yang positif kuat terhadap pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dimana hasil penelitian berdasarkan uji korelasi kebijakan pengawasan terhadap pelayanan publik adalah 0,97. dibandingkan dengan tabel kritik r product moment (n=30) dengan df = 95 % terdapat angka r tabel = 0.349 dimana $r_{xy} = 0,97 > 0,349$ ini menyatakan kebijakan pengawasan memiliki hubungan yang positif kuat terhadap pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisy, S. (2022). Pelaksanaan pelayanan publik menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ditinjau dari Siyasa Dusturiyah (Studi kasus Dinas Kependudukan Catatan Sipil Purwakarta) (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Dwiyanto, A. (2021). Reformasi birokrasi publik di Indonesia. Ugm Press.
- Gibson Inwancevich & Donelly, Organisasi Jilid I, Terjemahan Darkasih, Erlangga. Jakarta.
- Gitosudarmo, 2012 Organisasi dan Manajemen, Cetakan VI, Gramedia, Jakarta.
- Handoko, 2010, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, Cetakan Ketujuh Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
- Hartino, H. (2020). PENGARUH KEPEMIMPINAN, PENGALAMAN KERJA, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN (Doctoral dissertation, Universitas Widya Dharma Klaten).
- Indiahono, D. (2017). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis (Cetakan 1). Klitren Lor GK III/15 Yogyakarta: Gava Media.
- INDONESIA, P. R. (2009). Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Kadarman, 2013, pengawasan dan kebijakan Manajemen, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Moekijat, Adminitrasi Perkantoran, Mandar Maju, Bandung, 2013, hal. 105
- Moenir, 2013, Pendekatan Manusia & Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, Gunung Agung, Jakarta
- Rambe, S., & Dalimunte, N. (2022). Supervision Policy On Public Services At The Office Of Transportations Of North Sumatra Province. LEGAL BRIEF, 11(3), 1861-1869.
- Sailendra, A. (2015). Langkah-langkah praktis membuat SOP. Yogyakarta: Trans Idea Publishing.
- Soewarno, 2015, Organisasi, Cetakan ketuju, Penerbit Angkasa, Jakarta. Undang-Sri Hartati Jatmikowati, 2013 Manajemen Pelayanan Publik, Menuju Good Gaverman, Universitas Merdeka Malang, Malang
- Suharsimi, A. (2006). Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 134.
- Sukarna, 2013, pengawasan dan kebijakan Manajemen, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta

Pengaruh Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelayanan Publik Pada Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara

Ahmad Dani, Sandi

Suryandari, S. Y. (2019). Metode penelitian kualitatif:(untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif).

Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.